



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1361/2022
TENTANG
PESERTA PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS
DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS
ANGKATAN KEDUA PULUH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialistik, perlu dilakukan upaya pemerataan dokter spesialis di seluruh Indonesia;

b. bahwa upaya pemerataan pelayanan kesehatan spesialistik dilakukan melalui penempatan peserta dokter spesialis dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peserta Penempatan Dokter Spesialis Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis Angkatan Kedua Puluh Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 705);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter

Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1121);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/174/2020 tentang Penambahan Jenis Spesialisasi Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PESERTA PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS ANGKATAN KEDUA PULUH TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan peserta penempatan dokter spesialis dalam rangka pendayagunaan dokter spesialis angkatan kedua puluh tahun 2022 yang selanjutnya disebut Peserta sesuai dengan daftar nama dan lokasi penempatan Peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas dokter spesialis obstetri dan ginekologi, spesialis anak, spesialis penyakit dalam, spesialis bedah, spesialis anestesi dan terapi intensif, spesialis radiologi, dan spesialis patologi klinik.

KETIGA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. penerima bantuan biaya pendidikan secara langsung; dan
- b. penerima bantuan biaya pendidikan secara tidak langsung.

KEEMPAT : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berstatus ASN dan nonASN.

- KELIMA : Jangka waktu penempatan Peserta penerima bantuan biaya pendidikan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Jangka waktu penempatan Peserta penerima bantuan biaya pendidikan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b dengan status ASN sesuai dengan ketentuan instansi asal masing-masing.
- KETUJUH : Jangka waktu penempatan Peserta penerima bantuan biaya pendidikan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b dengan status nonASN selama 12 (dua belas) bulan.
- KEDELAPAN : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1361/2022
TENTANG
PESERTA PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS
DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER
SPESIALIS ANGKATAN KEDUA PULUH TAHUN 2022

DAFTAR NAMA DAN LOKASI PENEMPATAN PESERTA PENEMPATAN
DOKTER SPESIALIS DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER
SPESIALIS ANGKATAN KEDUA PULUH TAHUN 2022

A. Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Secara Langsung

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
1	dr. Yeni Maryati, Sp.A	Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen	Bireuen	Aceh	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2	dr. Fiona Septi Mulya, Sp.PK	RSUD Solok	Kota Solok	Sumatera Barat	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3	dr. Tri Tunggal Malahayati, Sp.A	Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman	Padang Pariaman	Sumatera Barat	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
4	dr. Ahmad Fitriawan, Sp.OG	RSUD Sungai Dareh	Dharmasraya	Sumatera Barat	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5	dr. Weni Wahyuni, Sp.An	Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	Musi Banyuasin	Sumatera Selatan	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6	dr. Nipolin Sonoki Meidiansyah, Sp.B	Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim	Muara Enim	Sumatera Selatan	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7	dr. Dewi Setiyawati, Sp.OG	RSUD Talang Ubi	Penukal Abab Lematang Ilir	Sumatera Selatan	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8	dr. Atika Puspa Dewi, Sp.Rad	RSUD Kabupaten Bengkulu Tengah	Bengkulu Tengah	Bengkulu	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9	dr. Tinton Ardiyan, Sp.B	RSUD Toboali	Bangka Selatan	Kepulauan Bangka Belitung	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
					perundang- undangan
10	dr. Dicki Iman Ginangjar, Sp.A	Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
11	dr. Dedy Setiawan, Sp.A	Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna	Natuna	Kepulauan Riau	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
12	dr. Galuhafiar Puratmaja, Sp.A	Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran	Pangandaran	Jawa Barat	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
13	dr. Muhammad Rizki Darmawan Mustakim, Sp.A	RSUD Sayang Kabupaten Cianjur	Cianjur	Jawa Barat	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
14	dr. Mariska Inggrida, Sp.A	RSUD Kota Banjar	Kota Banjar	Jawa Barat	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
15	dr. Suciati Jandraning- rum, Sp.A	Pemerintah Daerah Kabupaten Blora	Blora	Jawa Tengah	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
16	dr. Rakano Kautsar Dwiwana, Sp.OG	RSUD Wates	Kulon Progo	Daerah Istimewa Yogyakarta	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
17	dr. Perdhana Kusuma, Sp.B	RSUD Kota Madiun	Kota Madiun	Jawa Timur	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
18	dr. Supriadi, Sp.PD	RS H.L Manambai Abdulkadir	Sumbawa	Nusa Tenggara Barat	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
19	dr. Maria Christina Noi Sedu, Sp.A	Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada	Ngada	Nusa Tenggara Timur	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
20	dr. Alex Danu Puspito, Sp.Rad	RSUD Dr. Doris Sylvanus	Kota Palangka Raya	Kalimantan Tengah	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
					perundang-undangan
21	dr. Amanda Cininta Wowor, Sp.PD	RSUD Kabupaten Nunukan	Nunukan	Kalimantan Utara	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
22	dr. David Margin Wenas, Sp.A	RSUD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Bolaang Mongondow Selatan	Sulawesi Utara	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
23	dr. Ferdinan Goutama, Sp.PD	RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud	Kepulauan Talaud	Sulawesi Utara	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
24	dr. Ahmad Ihsan, Sp.A	Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba	Bulukumba	Sulawesi Selatan	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
25	dr. A. Yulkardian- syah, Sp.B	RSUD La Temmamala	Soppeng	Sulawesi Selatan	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
26	dr. Ridwan, Sp.An	RSUD La Temmamala	Soppeng	Sulawesi Selatan	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
27	dr. Elia Tombe, Sp.OG	RSUD Lakipadada	Tana Toraja	Sulawesi Selatan	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
28	dr. Yuliati, Sp.OG	RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Takalar	Takalar	Sulawesi Selatan	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
29	dr. Livy Leonard Lieswan, Sp.OG	RSUD Bahteramas	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
30	dr. Fikri Baladraf, Sp.PD	RSUD dr Hasri Ainun Habibie	Gorontalo	Gorontalo	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
31	dr. Gressella Khadijah Mamangkey, Sp.OG	RSUD dr Hasri Ainun Habibie	Gorontalo	Gorontalo	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
					perundang- undangan
32	dr. Najmiah Nur Indah Djakaria, Sp.OG	RSUD Dr. Zainal Umar Sidiki	Gorontalo Utara	Gorontalo	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
33	dr. Abdullah Syawal Muchlis, Sp.An	Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju	Mamuju	Sulawesi Barat	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
34	dr. Meidry Tinasia Teslatu, Sp.A	RSUD Karel Sadsuitubun	Maluku Tenggara	Maluku	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
35	dr. Muhammad Abdu, Sp.B	RSUD Teluk Bintuni	Teluk Bintuni	Papua Barat	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
36	dr. Lidwina Tika Trisnawati, Sp.PD	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

B. Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Secara Tidak Langsung yang Berstatus ASN

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
1	dr. Alia Desmalia, Sp.OG	RSUD Sultan Thaha Syaifuddin	Tebo	Jambi	Sesuai dengan ketentuan instansi asal
2	dr. Ades Santa Satria, Sp.B	Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin	Banyuasin	Sumatera Selatan	Sesuai dengan ketentuan instansi asal
3	dr. Dwi Ris Andriyanto, Sp.B	Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin	Banyuasin	Sumatera Selatan	Sesuai dengan ketentuan instansi asal
4	dr. Dwi Retno Wulandari, Sp.A	Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo	Sidoarjo	Jawa Timur	Sesuai dengan ketentuan instansi asal
5	dr. Mega Malynda, Sp.A	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan	Bangkalan	Jawa Timur	Sesuai dengan ketentuan instansi asal
6	dr. Andi Wija Indrawan Pangerang, Sp.An	Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin	Kota Makassar	Sulawesi Selatan	Sesuai dengan ketentuan instansi asal

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
7	dr. Endarwati Nurdin, Sp.A	Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur	Luwu Timur	Sulawesi Selatan	Sesuai dengan ketentuan instansi asal
8	dr. Ni Made Indah Dwijayanti Atmaja, Sp.A	Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat	Maluku Tenggara Barat	Maluku	Sesuai dengan ketentuan instansi asal

C. Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Secara Tidak Langsung yang Berstatus nonASN

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
1	dr. Nancy Piomas, Sp.PD	RSUD Salak	Pakpak Bharat	Sumatera Utara	12 bulan
2	dr. Alfiani Sari Rezeki Chamayasinta, Sp.OG	RS AL Belawan	Kota Medan	Sumatera Utara	12 bulan
3	dr. Eko Rizki, Sp.B	RSUD Tapan	Pesisir Selatan	Sumatera Barat	12 bulan
4	dr. Risang Bhaskoro, Sp.OG	RSUD Sawah Lunto	Kota Sawah Lunto	Sumatera Barat	12 bulan
5	dr. Rizqi Aulia Oetama, Sp.PD	RS Kelas D Pratama	Pasaman	Sumatera Barat	12 bulan
6	dr. Meice Fitriana, Sp.OG	RSUD Bintan	Bintan	Kepulauan Riau	12 bulan
7	dr. Rizki Adrian Hakim, Sp.PD	RSUD Dabo	Lingga	Kepulauan Riau	12 bulan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
8	dr. Nadya R V Barus, Sp.PD	RSUD Pameung- peuk	Garut	Jawa Barat	12 bulan
9	dr. Alfi Marita Tristiarti, Sp.OG	RSUD Simo	Boyolali	Jawa Tengah	12 bulan
10	dr. Erfenes, Sp.OG	RSUD Umar Mas'ud	Gresik	Jawa Timur	12 bulan
11	dr. Muhammad Rizal Abdul Munaf, Sp.PD	RSUD Umar Mas'ud	Gresik	Jawa Timur	12 bulan
12	dr. Budi Waluyo, Sp.An	RSUD Umar Mas'ud	Gresik	Jawa Timur	12 bulan
13	dr. Dwi Cahya Febrimulya, Sp.OG	RSUD Balung	Jember	Jawa Timur	12 bulan
14	dr. Ferdi Yanto, Sp.An	RS Giri Emas	Buleleng	Bali	12 bulan
15	dr. Juniar Anugrah, Sp.An	RSU Dompu	Dompu	Nusa Tenggara Barat	12 bulan
16	dr. Marini Taslima, Sp.PK	RSU Dompu	Dompu	Nusa Tenggara Barat	12 bulan
17	dr. Rahma Ira Mustikasari, Sp.A	RSUD Kabupaten Lombok Utara	Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat	12 bulan
18	dr. Maria Christine Florens Sandra, Sp.A	RSU Dr. R. Sudjono	Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat	12 bulan
19	dr. Nadia Ophelia Shalome Nurdin, Sp.OG	RSU Sumbawa Besar	Sumbawa	Nusa Tenggara Barat	12 bulan
20	dr. Nadya Mutiar Viryani, Sp.PD	RSUD Awet Muda Narmada	Lombok Barat	Nusa Tenggara Barat	12 bulan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
21	dr. William Cheng, Sp.A	RSUD Awet Muda Narmada	Lombok Barat	Nusa Tenggara Barat	12 bulan
22	dr. Yuvens Richardo Wibowo, Sp.OG	RSUD Rote Ndao Ba'a	Rote Ndao	Nusa Tenggara Timur	12 bulan
23	dr. Christya Lorena G, Sp.An	RSU Bajawa	Ngada	Nusa Tenggara Timur	12 bulan
24	dr. Hermin Sabaruddin, Sp.OG	RSU Dr. Rubini Mempawah	Mempawah	Kalimantan Barat	12 bulan
25	dr. T. Fenny Novhera, Sp.B	RSU Dr. Rubini Mempawah	Mempawah	Kalimantan Barat	12 bulan
26	dr. Soetanto, Sp.PD	RSUD Melawi	Melawi	Kalimantan Barat	12 bulan
27	dr. Vicky Rustan, Sp.OG	RSUD Trikora Salakan	Banggai Kepulauan	Sulawesi Tengah	12 bulan
28	dr. Wisnu Adryanto, Sp.PD	RSUD Trikora Salakan	Banggai Kepulauan	Sulawesi Tengah	12 bulan
29	dr. Ibnul Barakah, Sp.B	RSUD Raja Tombolotutu	Parigi Moutong	Sulawesi Tengah	12 bulan
30	dr. Muh. Kemal Putra, Sp.An	RSUD Batara Siang	Pangkajene Kepulauan	Sulawesi Selatan	12 bulan
31	dr. Eka Sri Handayani , Sp.A	RSUD Buton Utara	Buton Utara	Sulawesi Tenggara	12 bulan
32	dr. Okto Sampe Padang, Sp.B	RSUD Wakatobi	Wakatobi	Sulawesi Tenggara	12 bulan
33	dr. Sukriyah Ambarwati Darise, Sp.An	RSUD Wakatobi	Wakatobi	Sulawesi Tenggara	12 bulan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
34	dr. Fendy A. Pamolango, Sp.PD	RSUD Tombulilato	Bone Bolango	Gorontalo	12 bulan
35	dr. Malik Chandra, Sp.PD	RSUD Mamuju Tengah	Mamuju Tengah	Sulawesi Barat	12 bulan
36	dr. Mouris Titin Dwiputra, Sp.B	RSUD Mamuju Tengah	Mamuju Tengah	Sulawesi Barat	12 bulan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003